

Pelayanan Kenaikan Pangkat Melalui Aplikasi Sistem Pengelolaan Kenaikan Pangkat Studi di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo

Novi Tata Wandira¹, Teguh Santoso², Radjikan³

^{1,2,3} Administrasi Publik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

noviwandira25@gmail.com¹, teguh@untag-sby.ac.id², radjikan@untag-sby.ac.id³

Abstract.

The Regional Personnel Agency of Sidoarjo Regency which has duties and functions as well as authority in the field of personnel to be able to improve the quality of personnel administration services (especially in Sidoarjo Regency) through Innovation Government and Electronic Government. BKD Sidoarjo launched an electronic-based application called SIPEKAT (Promotion Management System). Based on the Decree of the Regent of Sidoarjo Number: 800/307/404.6.1/2015 SIPEKAT can stream personnel services and face-to-face processes between admins or staff in the Rank and Pension Sub-Sector with the desired party are reduced. This study uses a descriptive research method with a qualitative approach. Data collection techniques in this study through interviews, observation and documentation. The results showed that SIPEKAT services had been responded well by Sidoarjo civil servants, adequate infrastructure in terms of hardware and software to achieve the objectives of this SIPEKAT service. In short, an Electronic Government-based personnel administration service system to realize the Smart City Sidoarjo program. The SIPEKAT application has been implemented by the 2016 Regional Personnel Agency, which aims to provide ASN promotion services in the Sidoarjo area with a paperless system, it is enough to upload files online through the SIPEKAT application. With this system, you can stream staffing services and face-to-face processes. Thus, the Sidoarjo State Civil Apparatus (ASN) can more easily carry out personnel management.

Keywords: Services, Promotion, SIPEKAT, and Regional Personnel Board.

Abstrak.

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo yang mempunyai tugas dan fungsi serta kewenangan di bidang kepegawaian dituntut untuk mampu meningkatkan kualitas layanan administrasi kepegawaian (khususnya di Kabupaten Sidoarjo) melalui Innovation Government dan Electronic Government. BKD Sidoarjo meluncurkan aplikasi berbasis elektronik yang bernama SIPEKAT (Sistem Pengelolaan Kenaikan Pangkat). Berdasarkan SK Bupati Sidoarjo Nomor: 800/307/404.6.1/2015 SIPEKAT dapat memangkas alur layanan kepegawaian dan proses tatap muka antara admin atau staf di Sub Bidang Kepangkatan dan Pensiun dengan pihak yang berkepentingan menjadi berkurang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan layanan SIPEKAT sudah cukup direspon dengan baik oleh PNS Sidoarjo, infrastruktur yang memadai baik dari segi Hardware dan Software guna untuk mencapai tujuan dari layanan SIPEKAT ini. Kesimpulan singkat Sistem layanan administrasi kepegawaian berbasis Electronic Government untuk mewujudkan program Sidoarjo Smart City. Aplikasi SIPEKAT mulai diimplementasikan oleh Badan Kepegawaian Daerah 2016 yang bertujuan sebagai layanan pengusulan kenaikan pangkat ASN di wilayah Sidoarjo dengan sistem paperless, cukup melakukan upload berkas secara online melalui aplikasi SIPEKAT. Dengan sistem ini dapat

memangkas alur layanan kepegawaian dan proses tatap muka. Dengan demikian, Aparatur Sipil Negara (ASN) Sidoarjo dapat lebih mudah melakukan pengurusan kepegawaian.

Kata kunci : Pelayanan, Kenaikan Pangkat, SIPEKAT, dan Badan Kepegawaian Daerah.

Pendahuluan

Pelayanan publik merupakan pelayanan yang diberikan untuk masyarakat banyak. Upaya untuk menciptakan pelayanan publik yang baik tentunya tidak terlepas dari peran Aparatur Negara sebagai penyelenggaranya. Peran Aparatur Negara merupakan salah satu kunci dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. Untuk itu, akuntabilitas kinerja setiap penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya harus selalu ditingkatkan dan menjadi fokus perhatian bagi pemerintah.

Untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan sosok SDM aparatur (PNS) yang profesional, yang mempunyai perilaku sikap yang taat, disiplin, bermoral dan bermental baik serta akuntabel dan memiliki kesadaran yang tinggi terhadap tanggung jawab sebagai pemberi layanan publik yang baik. Sejalan dengan diterbitkannya UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo yang mempunyai tugas dan fungsi serta kewenangan di bidang kepegawaian wilayah Kabupaten Sidoarjo dituntut untuk mampu mewujudkan pengelolaan manajemen kepegawaian (khususnya di Kabupaten Sidoarjo) salah satunya yaitu pengusulan kenaikan pangkat ASN secara optimal dalam upaya mewujudkan SDM aparatur yang profesional.

Berdasarkan wawancara awal dengan Nur Indriani Apriliyanti, S. STP., selaku Kepala Sub Bidang Kepangkatan dan Pensiun, diketahui bahwa terdapat beberapa masalah yang dihadapi oleh BKD Sidoarjo dalam menangani pelayanan pengelolaan kenaikan pangkat ASN melalui sistem manual. Hal ini sebagaimana wawancara berikut: “Sebelumnya dalam proses pengajuan Kenaikan Pangkat Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dalam setahun diberikan pada 2 periode waktu yaitu 1 April dan 1 Oktober dengan jumlah kurang lebih 1000 orang setiap periodenya, dengan jumlah berkas yang harus dihimpun adalah 2000×13 (dokumen) $\times 3$ (rangkap) = 78.000 berkas. Hal tersebut juga menjadi masalah karena terbatasnya tempat penyimpanan arsip berkas akibat besarnya jumlah berkas yang harus disimpan setiap periode kenaikan pangkat” (wawancara dilakukan pada 31 Maret 2022).

Menurut Ibu Sri Witorsih selaku Kepala BKD Sidoarjo dalam situs www.harianbhirawa.com yang dipublikasikan pada tanggal 4 Juni 2017 terdapat masalah yang dihadapi oleh BKD Sidoarjo dalam menangani pelayanan kenaikan pangkat ASN melalui sistem manual jika dilihat dari segi keamanan yaitu pada saat proses pengajuan kenaikan pangkat apabila berkas yang dipersyaratkan terdapat kekurangan maka ASN harus bolak-balik hal tersebut dapat menghabiskan waktu di jalan (tidak efisien). Banyaknya permasalahan yang ada menunjukkan bahwa belum optimalnya proses pengusulan kenaikan pangkat yang disebabkan karena pelayanan yang masih menggunakan sistem manual.

Oleh karena itu sangatlah penting apabila upaya peningkatan kualitas SDM aparatur ini direncanakan dan disusun melalui suatu program inovasi yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan penerima layanan. Di sisi lain tuntutan layanan inovasi tersebut datang dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jika dilihat dari segi Pemerintah Pusat hal ini merespon adanya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan EGovernment.

Menurut Wakil Bupati Sidoarjo dalam situs www.sidoarjokab.go.id yang dipublikasikan pada tanggal 23 Mei 2017 penerapan pelayanan berbasis e-Government di Sidoarjo merupakan

salah satu wujud dari program Smart City yang diprioritaskan oleh Bupati Sidoarjo dalam meningkatkan efektifitas pelayanan publik berbasis e-Government serta dapat mendorong terciptanya Good Governance dalam Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo. Merujuk pada permasalahan yang dihadapi oleh BKD Sidoarjo serta adanya tuntutan layanan dalam segi Innovation Government dan Electronic Government dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah maka BKD Sidoarjo meluncurkan aplikasi berbasis elektronik yang bernama SIPEKAT (Sistem Pengelolaan Kenaikan Pangkat). SIPEKAT mulai diimplementasikan oleh BKD Sidoarjo pada bulan November 2015 untuk usulan kenaikan pangkat periode 1 April 2016. Berdasarkan SK Bupati Sidoarjo Nomor: 800/307/404.6.1/2015 dengan adanya sistem ini dapat memangkas alur layanan kepegawaian dan proses tatap muka antara admin atau staf di Sub Bidang Kenaikan Pangkat dan Pensiu dengan pihak yang berkepentingan menjadi berkurang sehingga dapat meminimalisir potensi terjadinya praktik pungutan liar dan juga KKN. Dengan demikian Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat lebih mudah dalam melakukan pengurusan kepegawaian. Melalui SIPEKAT ini terbangun sebuah Berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui bahwa adanya aplikasi SIPEKAT dapat memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh ASN di Kabupaten Sidoarjo, khususnya kemudahan dalam proses kenaikan pangkat. Serta sebagai aplikasi pelayanan publik berbasis e-Government yang baru dikembangkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo. Maka perlu mengetahui lebih lanjut bagaimana implementasi SIPEKAT dapat dijalankan sehingga perlu untuk melakukan penelitian yang lebih dalam melalui “Implementasi Layanan Sistem Pengelolaan Kenaikan Pangkat (SIPEKAT) Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dokumentasi. Sedangkan teknik analisis datanya menggunakan 3 cara yaitu pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan

Hasil dan Pembahasan

SIPEKAT merupakan suatu sistem informasi kepegawaian yang dapat diakses oleh semua OPD, berfungsi sebagai alat komunikasi antara BKD dan OPD dalam proses pengurusan Kenaikan Pangkat. Untuk mewujudkan pelayanan yang lebih baik menurut Rianto dan Lestari 1. Hardware Perangkat keras komputer (hardware) yang disediakan oleh BKD Sidoarjo dinilai cukup memadai dalam pengopresian aplikasi SIPEKAT. Telah disediakan 5 unit komputer untuk Tim Pelaksana Program. Dinkominfo Sidoarjo mempunyai peran penting terhadap adanya aplikasi ini karena telah membantu Bidang Pengembangan selaku Tim Monitoring dalam menciptakan jaringan internet dan menyimpan fisik server aplikasi SIPEKAT. 2. Software Software (perangkat lunak) yang digunakan untuk aplikasi SIPEKAT yaitu software aplikasi berbasis website. Yang terlibat dalam pembuatan software aplikasi ini yaitu BKD Sidoarjo bekerjasama dengan pihak ketiga yaitu PT. Valsix Kreasi Teknologi. Untuk server yang dimiliki BKD Sidoarjo telah didukung dengan prosesor yang bersifat scalable dan RAM yang besar. Software yang ada telah dijaga dengan aman untuk menghindari hacker. Tim teknis beserta tim monitoring mengontrol dan membackup data yang ada secara berkala untuk menghindari hacker. Harapan yang diinginkan oleh pelaksana aplikasi SIPEKAT yaitu tidak ada pembajak yang dengan sengaja merusak aplikasi SIPEKAT. Adanya kendala lain yang ada yaitu gangguan koneksi internet yang terkadang bermasalah akibat terkena petir dan kendala pada saat proses upload berkas pada akhir deadline atau pada akhir batas pengusulan kenaikan

pangkat terkadang sistem aplikasi bermasalah karena tidak sedikit yang mengakses aplikasinya. Faktor yang terpenting dalam mewujudkan layanan E-Government yaitu adanya sumber dana untuk hardware dan software. Sumber dana yang ada untuk menciptakan hardware dan software yaitu anggaran dari APBD sebesar Rp. 20.000.000,00 dengan induk Pembangunan/ Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah. Mengingat karena adanya peran Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang telah menyadari betul akan kualitas dan efektifitas manajemen kepegawaian di Sidoarjo. 3. Human Resources (SDM) SDM yang ada untuk pelaksana aplikasi SIPEKAT masih terdapat beberapa yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan dalam bidang teknologi informasi atau dalam artian yang bukan ahli di bidang IT. Akan tetapi, dengan diberikannya pendidikan dan pelatihan khusus oleh Kepala BKD Sidoarjo mengenai perubahan proses layanan administrasi dengan menganut sistem eGovernment, saat ini SDM yang ada telah berkompeten untuk merealisasikan perkembangan pelayanan berbasis online di BKD Sidoarjo. Hal ini tercermin dengan adanya penghargaan dari Menteri PAN-RB yaitu inovasi SIPEKAT masuk dalam Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Nasional Tahun 2017. 4. Data dan Informasi Adanya data dan informasi yang diberikan oleh BKD Sidoarjo dalam layanan SIPEKAT yaitu data internal yang dimiliki oleh Bidang Mutasi di BKD Sidoarjo yaitu adanya digitalisasi dokumen, dokumen yang dimaksut yaitu arsip-arsip kepegawaian bagi seluruh PNS Sidoarjo yang berupa soft file. Di sisi lain juga terdapat data dan informasi mengenai agenda yang akan datang yang dicantumkan dalam aplikasi SIPEKAT. Untuk kedepannya, Kepala Bidang Mutasi BKD Sidoarjo akan menambahkan fitur baru dalam aplikasi yaitu fitur yang dapat menyimpan dokumen persyaratan berkas usulan kenaikan pangkat demi memberikan kemudahan untuk PNS Sidoarjo yang akan mengusulkan kenaikan pangkat di periode selanjutnya. Adanya data dan informasi yang tersedia di website SIPEKAT serta informasi yang berasal dari pihak pengelolanya secara langsung sudah cukup memberikan informasi kepada seluruh SKPD di Kabupaten Sidoarjo. 5. Struktur Organisasi Struktur organisasi merupakan suatu hal yang juga ikut menentukan terwujudnya layanan SIPEKAT. Struktur Organisasi yang ada untuk melaksanakan program inovasi pelayanan SIPEKAT berasal dari Sub Bidang Kepangkatan dan Pensiun di Bidang Mutasi dan ada sebagian dari Sub Bidang Perencanaan dan Informasi ASN selaku Tim Monitoring. Dalam struktur organisasinya masih terdapat SDM yang tidak sesuai dengan latar pendidikan dalam bidang teknologi informasi. Namun, hal tersebut tidak lagi menjadi halangan dalam berjalannya program layanan. Struktur organisasi yang dengan tepat dipilih langsung oleh Kepala BKD Sidoarjo serta yang telah diberikan pendidikan dan pelatihan khusus ini dinilai telah berkompeten dan mempunyai landasan yang cukup untuk merealisasikan perkembangan pelayanan berbasis online di BKD Sidoarjo, guna mewujudkan program Smart City. 6. Komunikasi Proses komunikasi yang dilakukan oleh BKD Sidoarjo dengan SKPD lain salah satunya yaitu sosialisasi yang bertujuan untuk membangun perspektif yang sama antara pihak BKD dan pihak SKPD lain sebagai pengguna aplikasi SIPEKAT. Sosialisasi yang dilakukan atau diadakan oleh Bidang Mutasi BKD Sidoarjo yaitu memberikan pelatihan khusus kepada SKPD lain, SKPD seluruh Kabupaten Sidoarjo dibekali ilmu dalam menggunakan aplikasi SIPEKAT. Hal ini dapat disimpulkan bahwa saluran komunikasi yang digunakan sudah cukup memadai dan komunikasi yang dilakukan yaitu berkoordinasi dengan setiap SKPD terkait dalam menanggapi pengaduan atau keluhan oleh SKPD lain kepada tim teknis di Bidang Mutasi BKD Sidoarjo. Bukan hanya itu, sosialisasi yang dilakukan oleh Bidang Mutasi dinilai cukup optimal dan berhasil karena dapat direspon SKPD lain dengan baik. Proses komunikasi yang lain yaitu melibatkan Bupati Sidoarjo dalam rangka penyerahan SK Kenaikan Pangkat yang dilakukan setiap periode kenaikan pangkat ASN di Sidoarjo. 7. Sikap Pelaksana Yang tidak kalah penting untuk menjadi perhatian utama dalam mewujudkan layanan SIPEKAT dan untuk mewujudkan layanan administrasi kepegawaian yang lebih baik yaitu bagaimana sikap pelaksana implementornya. BKD Sidoarjo terutama Bidang Mutasi telah mengimplementasikan program

sistem layanan kenaikan pangkat secara optimal dan konsisten. Karena, hal tersebut merupakan kewajiban, komitmen serta tanggung jawab BKD Sidoarjo atas memberikan layanan kepada seluruh PNS di Sidoarjo. Sikap pelaksana yang diberikan oleh Sub Bidang Kepangkatan dan Pensiun di Bidang Mutasi BKD Sidoarjo telah direspon baik oleh admin pengguna aplikasi SIPEKAT, karena tim pengelola aplikasi telah merespon dengan cepat dan tanggap adanya keluhan dari admin lain pengguna aplikasi. Sedikit respon negatif dari sikap pengguna di SKPD lain, yaitu dengan adanya layanan SIPEKAT terdapat kendala masih banyaknya SKPD yang belum memiliki mesin scanner untuk menjadikan berkas hardcopy ke softcopy. Oleh karena itu, adanya SIPEKAT ini sedikit dinilai ribet oleh pelaksana dari SKPD lain. Namun selebihnya sikap pelaksana atau implementornya dinilai sudah cukup optimal dan professional.

Penutup

Hasil penelitian ini terkait dengan Implementasi Layanan Sistem Pengelolaan Kenaikan Pangkat (SIPEKAT) di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo sudah cukup baik. Sistem layanan administrasi kepegawaian berbasis Electronic Government untuk mewujudkan program Sidoarjo Smart City. Aplikasi berbasis website ini juga telah mendapat dukungan penuh oleh Bupati Sidoarjo. Software yang digunakan untuk aplikasi SIPEKAT yaitu software aplikasi berbasis website. Adanya kendala lain yang ada yaitu gangguan koneksi internet yang terkadang bermasalah akibat terkena petir. Faktor yang terpenting dalam mewujudkan layanan E-Government yaitu adanya sumber dana untuk hardware dan software yaitu anggaran dari APBD sebesar Rp. 20.000.000,00. Indikator ketiga yaitu SDM yang ada untuk pelaksana aplikasi SIPEKAT masih terdapat beberapa yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Akan tetapi, dengan diberikannya pendidikan dan pelatihan khusus oleh Kepala BKD Sidoarjo saat ini SDM yang ada telah berkompeten untuk merealisasikan perkembangan pelayanan berbasis online di BKD Sidoarjo. Indikator keempat adanya data dan informasi yang diberikan oleh BKD Sidoarjo dalam layanan SIPEKAT yaitu data internal yang dimiliki oleh Bidang Mutasi di BKD Sidoarjo yaitu adanya digitalisasi dokumen, dokumen yang dimaksut yaitu arsip-arsip kepegawaian bagi seluruh PNS Sidoarjo yang berupa soft file.

Daftar Pustaka

Dharmawan I Wayan, A.A. Gede Raka dan I Made Mardika. (2019). *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Akrual Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Pemerintah Kabupaten Badung*. Fakultas Pasca Sarjana. Universitas Warmadewa Bali

Lexy J. Moleong. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Posdakarya Bandung

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 63 tahun 2003 tentang Aparatur Negara

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 63 tahun 2004 tentang Aparatur Negara